



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kebijakan Naratif Mengenai Sistem Kurikulum Pendidikan Sekolah Rakyat Di Kalimantan Selatan

Narrative Policy Analysis on the Curriculum System of Public Schools in South Kalimantan

Muzahid Akbar Hayat¹, Annisa Zain Rofifah^{2*}, Fenny Risnanda Aulia Rahmi³, Khairunnisa⁴, Nuarinda Pandan Sari⁵, Rika Agustinah⁶

¹⁻⁶Universitas Islam Kalimantan (Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin), Indonesia

Corresponding Author: annisazainr@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 20 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 24 Dec, 2025

Kata Kunci:

Sekolah negeri untuk Indonesia yang gemilang

Keywords:

Public schools for a golden Indonesia

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9764](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9764)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Pendidikan adalah cara mengembangkan kemampuan, baik dari segi belajar maupun pengembangan diri. Sekolah negeri hadir untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, anak yang mengalami masalah sosial, serta kelompok rentan lainnya, sehingga mereka dapat memperoleh hak dasar atas pendidikan. Melalui pembelajaran keterampilan akademik dasar, keterampilan hidup, dan pengembangan karakter, mereka dapat melanjutkan pendidikan formal maupun non-formal. Tujuannya jelas: membekali mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian.

ABSTRACT

This study examines the Education is a way to develop skills, both in terms of learning and self-development. Public schools exist to provide educational services and learning for children from underprivileged families, street children, children experiencing social problems, and other vulnerable groups, so they can obtain their basic right to education. Through learning basic academic skills, life skills, and character development, they can continue their formal and non-formal education. The goal is clear: equipping them to improve their quality of life and independence.

PENDAHULUAN

Keterbatasan akses pendidikan akibat kemiskinan menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial yang menghalangi mereka untuk membeli perlengkapan sekolah, membayar biaya transportasi, atau bahkan mendapatkan gizi yang cukup untuk menunjang pembelajaran mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga sering kali menjadi penghalang, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih cenderung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah. Kondisi ini memperkuat siklus

kemiskinan yang sulit diputus jika akses pendidikan tidak diperluas secara inklusif. Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024 pada bulan Agustus, jumlah anak putus sekolah berjumlah 4,6 juta orang (Feika, 2025). Sekolah rakyat pertama kali didirikan pada masa kolonial belanda, di dirikan pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari politik etis untuk mendidik pribumi secara terbatas. Dimana sekolah yang didirikan memiliki tujuan bukan untuk memajukan kecerdasan intelektual pribumi melainkan untuk mencetak tenaga kerja berdasarkan yang dibutuhkan Perusahaan kolonial belanda.

Kemudian sekolah rakyat yang di dirikan oleh kolonial belanda hanya mampu bertahan selama 3 tahun Dimana sekolah tersebut memiliki tingkatan Pendidikan paling rendah yang di tujukan untuk anak-anak pribumi dengan berfokus pada kegiatan membaca, menulis dan berhitung. Pada tanggal 27 maret 2025 sekolah rakyat kembali didirikan sebagai program Pendidikan berasrama gratis yang di gagaslan oleh Presiden Prabowo Subianto kemudia di kelola oleh Kementrian Sosial untuk anak-anak dari keluarga miskin. Yang Dimana focus dari sekolah rakyat ini di buat untuk memutuskan rantai kemiskinan lewat Pendidikan. Penekanan sekolah rakyat ini bertujuan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 ini secara eksplisit disampaikan dalam visi dan misi Astacita yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran. Gagasannya dituangkan dalam visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam delapan misi yang akan menjadi panduan pemerintahan pada lima tahun mendatang. (Junaidi, 2025) Sama halnya dengan wilayah lain wilayah Kalimantan Selatan tepatnya di kota banjarbaru juga di dirikan sekolah rakyat di 3 tempat didirikan pada bulan juli 2025 yang berada di balai pesar pelatihan dan pengembangan kesejahteraan sosial (BBPPKS), sentral budi luhur, dan balai Latihan kerja (BLK). Dimana sekolah tersebut didirikan dengan tujuan memberikan Pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang sekolah rakyat yang berada di Kalimantan Selatan. Dengan konsep-konsep yang tersusun dalam analisis penelitian ini. Dengan demikian di harapkan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para pembacanya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Inklusif dan Akses Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi (UNESCO, 1994). Di Indonesia, konsep ini mencakup anak-anak dari keluarga miskin yang sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penghambat akses pendidikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan biaya, jarak geografis yang jauh, pandangan budaya yang lebih mengutamakan pekerjaan dibanding pendidikan, serta rendahnya motivasi belajar akibat stigma sosial (Suryahadi & Sambodho, 2013; Kristiansen & Pratikno, 2006).

Negara memiliki peran penting dalam pemerataan akses pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pendidikan bermutu bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Pemerataan akses pendidikan merupakan syarat utama terciptanya keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan (Tilaar, 2012).

B. Sekolah Rakyat sebagai Model Pendidikan Alternatif

Sekolah rakyat pertama kali muncul pada masa kolonial Belanda sebagai bagian dari Politik Etis, meski tujuannya saat itu terbatas pada penyediaan tenaga kerja rendahan. Ki Hajar Dewantara kemudian memperkenalkan konsep pendidikan progresif melalui Taman Siswa (1922),

yang menekankan pendidikan sebagai sarana pembebasan bagi seluruh lapisan masyarakat (Tauchid, 2004).

Pada 27 Maret 2025, pemerintahan Prabowo Subianto meluncurkan kembali Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan berasrama gratis di bawah Kementerian Sosial, dengan fokus pada pemutusan rantai kemiskinan.

Ciri utama Sekolah Rakyat modern meliputi sistem berasrama dengan fasilitas lengkap, biaya pendidikan yang sepenuhnya gratis, integrasi antara pendidikan akademik dan vokasional, pembinaan karakter secara intensif, serta prioritas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak jalanan (Kementerian Sosial, 2025).

Model pendidikan berasrama memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mengatasi hambatan geografis, menyediakan pengawasan intensif selama 24 jam, memenuhi kebutuhan dasar siswa, serta membentuk karakter kemandirian (Bass, 2014; Cookson & Persell, 2008). Model ini sangat efektif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sulit mengakses fasilitas pendidikan layak.

C. Kebijakan Pendidikan untuk Pengentasan Kemiskinan

Menurut teori Human Capital (Schultz, 1961; Becker, 1964), pendidikan merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Sen (1999) menambahkan bahwa pendidikan memperluas kebebasan dan peluang hidup seseorang. Laporan World Bank (2018) juga menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan rata-rata hingga 10%.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program pendidikan gratis, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa pendidikan, serta sekolah berasrama gratis sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.

Dalam Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi (Bappenas, 2019). Pemerintahan Prabowo–Gibran menjabarkan visi ini dalam Asta Cita, terutama pada cita ke-6, yaitu pembangunan SDM unggul melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas dan penguatan pendidikan vokasi (Junaidi, 2025). Program Sekolah Rakyat menjadi implementasi nyata dari visi tersebut, dengan memberikan akses pendidikan bagi kelompok marginal sekaligus berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan struktural.

D. Pendidikan di Kalimantan Selatan

Berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan (2024), masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok ekonomi. Tingkat kemiskinan mencapai 4,67% atau sekitar 197.430 jiwa, yang menjadi faktor penghambat utama akses pendidikan, terutama di beberapa kabupaten.

Kota Banjarbaru dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aksesibilitas tinggi sebagai ibu kota provinsi, dukungan infrastruktur seperti BBPPKS, Sentral Budi Luhur, dan BLK, serta komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan. Sejak Juli 2025, tiga Sekolah Rakyat telah beroperasi di Banjarbaru dan menerima ratusan siswa dari berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

METODE

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sekolah rakyat secara mendalam, termasuk tujuan, implementasi, dan dampaknya terhadap anak-anak dari keluarga miskin di Kalimantan Selatan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara deskriptif dan interpretatif mengenai pengalaman, persepsi, serta makna yang terkandung dalam pelaksanaan program sekolah rakyat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus (case study). Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sekolah rakyat yang didirikan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai satu unit analisis. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sekolah rakyat beroperasi, manfaat yang dirasakan peserta didik, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Lokasi penelitian terfokus pada tiga sekolah rakyat yang didirikan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yaitu: Balai Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Pemilihan lokasi ini dilakukan karena ketiga tempat tersebut menjadi representasi dari implementasi program sekolah rakyat di wilayah tersebut dan memiliki akses bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Data Sumber data penelitian dibagi menjadi dua:

- A. Data Primer: Wawancara mendalam dengan guru, staf sekolah, dan peserta didik. Observasi langsung terhadap kegiatan belajar-mengajar dan fasilitas sekolah. Dokumentasi internal sekolah, seperti laporan kegiatan, kurikulum, dan data kehadiran siswa.
- B. Data Sekunder: Dokumen resmi dari Kementerian Sosial dan Kemendikbudristek mengenai program sekolah rakyat. Artikel, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pendidikan inklusif dan program sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Berita dan publikasi terkait visi Indonesia Emas 2045 dan kebijakan pendidikan berasrama gratis.

HASIL

A. Deskripsi Kebijakan Kurikulum Sekolah Rakyat 2025

Kebijakan kurikulum pendidikan Sekolah Rakyat 2025 dirancang dengan tujuan yang strategis dan komprehensif. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan aksesibilitas serta mutu pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dalam konteks ini, aksesibilitas tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas fisik untuk belajar, tetapi juga meliputi penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai, seperti buku, alat peraga, dan pelatihan untuk para tenaga pengajar. Dengan demikian, kebijakan ini berupaya menjembatani kesenjangan pendidikan yang sering kali menghambat perkembangan individu dan komunitas.

Lebih lanjut, kebijakan ini bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Di era digital yang terus bertransformasi, keterampilan teknis menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, kurikulum Sekolah Rakyat 2025 akan mengintegrasikan pelajaran mengenai teknologi informasi dan komunikasi, serta keterampilan praktis lainnya yang dapat meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.

Struktur dan konten kurikulum yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat 2025 mencakup beragam mata pelajaran yang relevan dengan konteks lokal. Pendidikan harus mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat lokal, bukan hanya bersifat universal. Pengenalan kearifan lokal dalam kurikulum, seperti budaya, sejarah, dan tradisi daerah, penting untuk memperkuat identitas lokal dan mengajarkan siswa untuk menghargai serta melestarikan warisan budaya mereka.

Keterampilan teknologi akan menjadi fokus utama dalam kurikulum. Di era yang makin terhubung, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Pendidikan karakter akan menjadi bagian penting dari kurikulum. Ini mencakup pengembangan nilai moral, etika, dan sikap positif untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada masyarakat. Misalnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa diajarkan tentang kerja sama, toleransi, dan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan

sehari-hari.

Kurikulum Sekolah Rakyat 2025 juga akan memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik. Dalam hal ini, pendekatan pendidikan inklusif akan diterapkan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Contoh strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif adalah dengan menyediakan sumber daya tambahan, seperti alat bantu belajar dan dukungan dari pengajar yang terlatih.

B. Implementasi Kebijakan

Proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat merupakan langkah krusial dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum Sekolah Rakyat 2025. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui beragam kegiatan, seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan masyarakat. Pelatihan guru dan tenaga pendidik menjadi fokus utama dalam kebijakan ini untuk meningkatkan kompetensi pengajaran dan penerapan kurikulum baru.

Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan, seperti kurangnya dukungan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman tentang kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sosialisasi kebijakan sangat penting agar semua pihak memahami dan mendukung kebijakan baru. Dalam konteks Sekolah Rakyat 2025, sosialisasi bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Pertemuan dengan masyarakat menjadi aspek penting lainnya dalam sosialisasi kebijakan. Dalam pertemuan ini, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mendengarkan langsung aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Misalnya, jika terdapat orang tua yang merasa khawatir tentang perubahan kurikulum yang dianggap terlalu mendadak, pertemuan ini dapat menjadi kesempatan untuk menjelaskan manfaat dari kebijakan tersebut serta bagaimana perubahan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik adalah langkah krusial dalam implementasi kebijakan. Tanpa peningkatan kompetensi guru, kurikulum baru tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Pelatihan ini harus dirancang secara sistematis, mulai dari pengenalan konsep dasar kurikulum baru hingga strategi pengajaran yang inovatif. Misalnya, pelatihan dapat mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang semakin relevan di era digital saat ini. Dengan membekali guru dengan keterampilan yang tepat, mereka akan lebih percaya diri dalam mengajar dan menerapkan kurikulum baru.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan yang kuat, kebijakan yang baik sekalipun dapat terhambat. Misalnya, jika orang tua tidak menyadari keuntungan dari kurikulum baru, mereka cenderung tidak mendukung anak-anak mereka berpartisipasi dalam program tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi dan penjelasan mengenai manfaat kebijakan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi masalah kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Misalnya, program pengiriman guru ke daerah terpencil atau penyediaan fasilitas belajar yang memadai dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini.

Perbedaan pemahaman mengenai kebijakan yang diterapkan juga dapat menjadi hambatan. Setiap orang atau kelompok dapat memiliki pandangan berbeda mengenai kurikulum yang ideal. Oleh karena itu, penting untuk menjalin dialog terbuka di antara semua pihak. Membuka forum diskusi yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sarana untuk menyamakan persepsi

dan mencari solusi bersama.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama ini bisa berupa penyelenggaraan pelatihan, penyediaan sumber daya, dan pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengadakan pelatihan bagi guru di daerah terpencil, sehingga mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh umpan balik yang berharga tentang apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Survei atau forum diskusi dapat dilakukan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat tentang implementasi kurikulum baru. Dengan cara ini, masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki peran dalam proses pendidikan.

Pentingnya komunikasi yang efektif tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan ini. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua pihak akan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan terkait. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan efisien kepada masyarakat.

Sementara itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan juga sangat diperlukan. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah diterapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum baru, maka pelatihan tambahan dapat dilakukan untuk membantu mereka. Dengan demikian, kebijakan dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan indikator keberhasilan yang jelas. Indikator ini dapat mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam program pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan hasil belajar siswa. Dengan indikator yang jelas, semua pihak dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap pihak memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dan fasilitas, sementara lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan. Masyarakat, di sisi lain, dapat berperan aktif dalam mendukung program-program pendidikan di lingkungan mereka.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penting untuk tetap optimis dan berkomitmen terhadap tujuan pendidikan yang lebih baik. Meskipun perjalanan mungkin tidak selalu mulus, dengan kerja sama semua pihak, implementasi kebijakan kurikulum Sekolah Rakyat 2025 dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan anak-anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

C. Dampak Kebijakan terhadap Kualitas Pendidikan

Dampak kebijakan kurikulum pendidikan Sekolah Rakyat 2025 terhadap kualitas pendidikan merupakan isu yang sangat krusial dan relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini. Kebijakan ini tidak hanya terfokus pada aspek akademis, melainkan juga mencakup berbagai dimensi sosial dan ekonomi yang berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dalam pembahasan ini, kita akan mengelaborasi lebih dalam mengenai dampak positif yang dihasilkan oleh kebijakan ini, dengan penekanan pada tiga aspek utama: peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.

Pertama, mari kita lihat mengenai peningkatan akses pendidikan. Dalam konteks pendidikan di

Indonesia, akses pendidikan sering kali menjadi tantangan yang kompleks, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan Sekolah Rakyat 2025 berupaya menjawab tantangan ini dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Sebagai contoh, pembangunan sekolah di daerah terpencil dan pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu telah berhasil meningkatkan pendaftaran siswa.

Kedua, kualitas pembelajaran dan pengajaran juga mengalami kemajuan yang signifikan. Dengan adanya kurikulum yang lebih relevan dan pelatihan bagi guru, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Kurikulum baru ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Penggunaan alat bantu belajar seperti video pembelajaran dan aplikasi edukasi di smartphone memungkinkan siswa memahami materi dengan lebih baik.

Pelatihan guru juga menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Melalui program pelatihan yang berkelanjutan, guru-guru diberikan keterampilan baru dan metode pengajaran yang lebih inovatif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, tetapi juga memberikan motivasi dan semangat baru.

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan membawa dampak positif yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai fondasi bagi masa depan anak-anak mereka. Sekolah Rakyat mengajak orang tua dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan, seperti pertemuan, seminar, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pendidikan anak-anak. Sebagai contoh, di beberapa daerah, kelompok masyarakat bahkan membentuk komite sekolah yang bertugas untuk mengawasi dan mendukung program pendidikan di sekolah. Melalui keterlibatan ini, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam hal dana, tetapi juga dalam bentuk ide dan sumber daya yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.

Ketiga, pentingnya evaluasi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan ini tidak dapat diabaikan. Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, pemerintah dan pihak terkait dapat memantau kemajuan dan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi tahunan terhadap hasil belajar siswa dan kinerja guru dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kebijakan ini. Jika ditemukan bahwa ada aspek yang perlu diperbaiki, maka langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam analisis mendalam mengenai dampak kebijakan ini, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi. Meskipun peningkatan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran menjadi fokus utama, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Di beberapa daerah, infrastruktur pendidikan masih kurang memadai, seperti kurangnya ruang kelas yang layak dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak semua guru memiliki akses yang setara terhadap pelatihan dan pengembangan profesional, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran di kelas.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berupaya mengatasi kendala-kendala ini agar dampak positif dari kebijakan Sekolah Rakyat 2025 dapat dirasakan secara merata.

KESIMPULAN

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang digagas oleh pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Program pendidikan gratis ini mencakup jenjang dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan kurikulum yang dirancang khusus untuk mengembangkan kemampuan dan potensi siswa secara

optimal. Tiga aspek utama yang menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini meliputi peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan. Meski demikian, berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu dihadapi dengan serius agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai secara maksimal. Dengan adanya komitmen kuat dari seluruh pihak termasuk pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat diharapkan pendidikan di Indonesia dapat semakin berkualitas, merata, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Pelaksanaan kebijakan kurikulum Sekolah Rakyat 2025 merupakan proses yang kompleks yang menuntut perhatian serta koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan ini disusun untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Dalam konteks tersebut, sangat penting untuk mengkaji secara mendalam setiap aspek kebijakan ini mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi serta menemukan solusi atas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaannya.

Kebijakan kurikulum Sekolah Rakyat 2025 menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Di tengah era globalisasi dan revolusi industri, kebutuhan akan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman semakin mendesak, di mana dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter yang kuat.

PENJELASAN SINGKAT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan jurnal ini, khususnya kepada pembimbing dan lembaga yang memberikan dukungan serta fasilitas selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Damri. (2021). *Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah yang beragam peserta didiknya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firnanda, R., Nurviana, D., Aziz, F. F., & Diani, F. S. (2025). Pemerataan pendidikan berkualitas dalam perspektif Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti: Kajian komparatif atas gagasan dan implementasi sekolah rakyat sebagai model pendidikan alternatif. *Jurnal Edukasi dan Literasi Pendidikan*, 6(3).
- Isnaini, N. S., & Azizah, F. Z. (2020). Pentingnya pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. *ResearchGate.net*, August.
- Julaeha, S. (2019). Problematika kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157.
- Musfah, J. (2022). *Analisis kebijakan pendidikan: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 4(1).
- Simonigar, J., Rotty, G. V., & Setijadi, N. N. (2023). Membangun masyarakat 5.0 di era digital melalui pendidikan dan komunikasi berkelanjutan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1665–1676.

-
- Siwitomo, D. P. A., Fitriyani, N. N., & Fadhilah, N. N. (2023, December). Kolaborasi pendidikan: Strategi inovasi mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kemahasiswaan*, 1(1), 64–68.
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2024). Kesetaraan akses pendidikan: Analisis pengimplementasian nilai Pancasila dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 44–57
- Wahyudin, D. (2019). *Manajemen kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.